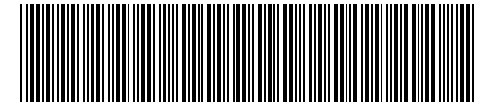




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.526732/2025**



DS:8111-8447-4040-9163

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 06 Januari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Sebesar : Rp. 15.896.553.000 (LIMA BELAS MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.896.553.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 15.896.553.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025

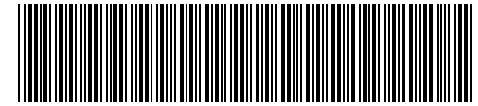


DS:8111-8447-4040-9163

Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	15.896.553.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	139.690.000
WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	15.756.863.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8111-8447-4040-9163

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			15.896.553.000
Kegiatan	:	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			139.690.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11,00	Unit, m2, Paket	139.690.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	11.00	Unit	139.690.000
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			15.756.863.000
	:					
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	15.756.563.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Laporan	700.000
	:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	15.755.863.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	300.000
Rincian Output	:	01 EBD.953				300.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025

I B. SUMBER DANA



DS:8111-8447-4040-9163

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

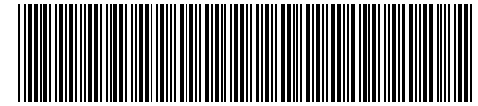
Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	15.896.553.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	15.896.553.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8111-8447-4040-9163

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	13.033.656	2.723.207	139.690	-	-	15.896.553		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.033.656	2.723.207	139.690	-	-	15.896.553		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	139.690	-	-	139.690		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	139.690	-	-	139.690	01 . 51	
01	RM	-	-	139.690	-	-	139.690	175	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	13.033.656	2.723.207	-	-	-	15.756.863		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	13.033.656	2.722.907	-	-	-	15.756.563	01 . 51	
01	RM	13.033.656	2.722.907	-	-	-	15.756.563	175@	
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	300	-	-	-	300	01 . 51	
01	RM	-	300	-	-	-	300	175	
JUMLAH		13.033.656	2.723.207	139.690	-	-	15.896.553		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8111-8447-4040-9163

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.480.732	1.349.000	2.740.535	1.071.786	1.007.802	1.717.177	1.415.640	1.044.454	1.003.145	1.289.497	950.136	826.649	15.896.553
		BELANJA PEGAWAI	1.364.231	919.285	2.241.232	909.849	894.150	1.527.492	911.019	911.019	910.949	867.275	859.380	717.773	13.033.656
		BELANJA BARANG	104.861	418.075	487.663	150.297	102.012	178.045	492.981	121.795	80.556	410.583	79.116	97.225	2.723.207
		BELANJA MODAL	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.650	139.690
	005.01.WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.650	139.690
		53 BELANJA MODAL	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.650	139.690
	005.01.WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1.469.092	1.337.360	2.728.895	1.060.146	996.162	1.705.537	1.404.000	1.032.814	991.505	1.277.857	938.496	814.999	15.756.863
		51 BELANJA PEGAWAI	1.364.231	919.285	2.241.232	909.849	894.150	1.527.492	911.019	911.019	910.949	867.275	859.380	717.773	13.033.656
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	104.861	418.075	487.663	150.297	102.012	178.045	492.981	121.795	80.556	410.583	79.116	97.225	2.723.207

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8111-8447-4040-9163

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [526732] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA			
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp. 24.450		
	52 Belanja Barang	Rp. 24.450		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 22.200		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.250		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:8111-8447-4040-9163

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [526732] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

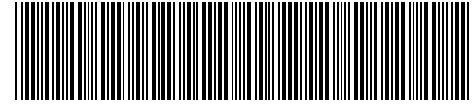
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

tt.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526733/2025**



DS:9641-4103-9783-0936

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Sebesar : Rp. 81.750.000 (DELAPAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 81.750.000
Rp. 81.750.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	81.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 81.750.000

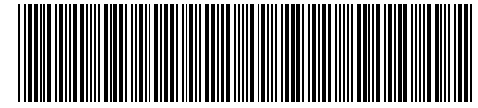
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9641-4103-9783-0936

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

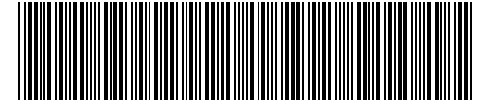
Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			81.750.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			81.750.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 02	-			
		2. 03	-			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	30.000.000
Rincian Output	:	01 AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	30.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	2,00	Perkara, Berkas Perkara	1.060.000
Rincian Output	:	01 BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2,00	Perkara	1.060.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96,00	Orang	33.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	17.690.000
Rincian Output	:	01 QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	1,00	Perkara	17.690.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



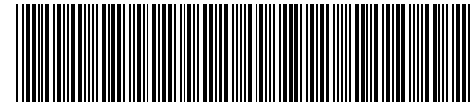
DS:9641-4103-9783-0936

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	-	81.750	-	-	-	81.750		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	81.750	-	-	-	81.750		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	81.750	-	-	-	81.750		
1059.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	30.000	-	-	-	30.000	01 . 51	
01	RM	-	30.000	-	-	-	30.000	175@	
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.060	-	-	-	1.060	01 . 51	
01	RM	-	1.060	-	-	-	1.060	175	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	33.000	-	-	-	33.000	01 . 51	
01	RM	-	33.000	-	-	-	33.000	175	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	17.690	-	-	-	17.690	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9641-4103-9783-0936

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Kewenangan : (KD)

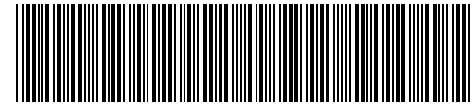
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	17.690	-	-	-	17.690	175@	
JUMLAH		-	81.750	-	-	-	81.750		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9641-4103-9783-0936

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	12.523	2.750	2.750	2.750	6.560	2.750	2.750	2.750	2.750	5.500	37.917	81.750
		BELANJA BARANG	0	12.523	2.750	2.750	2.750	6.560	2.750	2.750	2.750	2.750	5.500	37.917	81.750
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	12.523	2.750	2.750	2.750	6.560	2.750	2.750	2.750	2.750	5.500	37.917	81.750
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	12.523	2.750	2.750	2.750	6.560	2.750	2.750	2.750	2.750	5.500	37.917	81.750
		PERKIRAAN PENERIMAAN	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.498	9.504	113.982
		- PNBP (425232)	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	131	1.550
		- PNBP (425233)	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579	2.581	30.950
		- PNBP (425239)	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.790	6.792	81.482

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9641-4103-9783-0936

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [526733] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

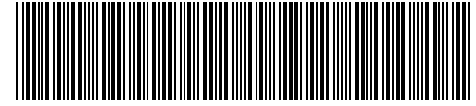
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 37.917 52 Belanja Barang Rp. 37.917		
005.05.BF 1059	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara		
1059.AEA	Koordinasi 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.227 Blokir Efisiensi TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300 Efisiensi Belanja APBN Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.390 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9641-4103-9783-0936

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [526733] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775